

KOMPONEN- KOMPONEN KURIKULUM DI ERA KURIKULUM: ANTARA OTONOMI GURU DAN STANDAR NASIONAL

Tantri

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Tantrit248@gmail.com

Abstract

The implementation of Kurikulum Merdeka marks a significant transformation in Indonesia's education system by positioning teacher autonomy as a central pillar of learning. This curriculum is designed to provide flexibility for educational institutions and teachers to develop contextual, differentiated, and student-centered learning processes. Nevertheless, such autonomy remains within the framework of national regulations established by the government through the Standar Nasional Pendidikan. This study aims to analyze the key components of the curriculum in the era of Kurikulum Merdeka and to examine the dynamics between teachers' pedagogical freedom and national regulatory demands. The main components analyzed include learning objectives, curriculum structure, assessment, teaching materials, and the strengthening of the Pancasila Student Profile. The study employs a literature review method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that Kurikulum Merdeka promotes a balance between flexibility in classroom implementation and quality accountability through structured graduate competency standards and learning outcomes. Therefore, the successful implementation of this curriculum largely depends on teachers' professional capacity to translate policy into innovative, reflective, and adaptive teaching practices that respond to students' needs.

Keywords: Kurikulum Merdeka; teacher autonomy; Standar Nasional Pendidikan; curriculum components; learning outcomes; assessment; Pancasila Student Profile.

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka menandai transformasi signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia dengan menempatkan otonomi guru sebagai salah satu pilar utama pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang proses belajar yang kontekstual, diferensiatif, dan berpusat pada peserta didik. Namun demikian, otonomi tersebut tetap berada dalam kerangka standar nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen-komponen kurikulum dalam era Kurikulum Merdeka serta mengkaji dinamika antara kebebasan pedagogis guru dan tuntutan regulasi nasional. Komponen utama yang dikaji meliputi tujuan pembelajaran, struktur kurikulum, asesmen,

perangkat ajar, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menghadirkan keseimbangan antara fleksibilitas implementasi di tingkat kelas dan akuntabilitas mutu melalui standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang terstruktur. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kurikulum ini sangat bergantung pada kapasitas profesional guru dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pembelajaran yang inovatif, reflektif, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; otonomi guru; Standar Nasional Pendidikan; komponen kurikulum; capaian pembelajaran; asesmen; Profil Pelajar Pancasila.

PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum merupakan bagian dari dinamika sistem pendidikan yang bertujuan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks Indonesia, lahirnya Kurikulum Merdeka menjadi respons terhadap tantangan pembelajaran abad ke-21, kebutuhan pemulihan pembelajaran pasca pandemi, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurikulum ini dirancang lebih sederhana, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik.

Salah satu karakter utama Kurikulum Merdeka adalah adanya keseimbangan antara otonomi guru dan standar nasional pendidikan. Guru diberikan ruang lebih luas untuk merancang dan mengelola pembelajaran sesuai karakteristik siswa, namun tetap berada dalam koridor kebijakan dan standar yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memahami komponen-komponen kurikulum dalam kerangka hubungan antara kebebasan profesional guru dan regulasi nasional.

Artikel ini akan membahas tiga komponen utama Kurikulum Merdeka, yaitu Capaian Pembelajaran sebagai standar nasional, perangkat pembelajaran sebagai wujud otonomi guru, serta struktur kurikulum dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual terhadap kebijakan dan komponen kurikulum dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Kementerian Pendidikan, buku, artikel jurnal ilmiah,

serta publikasi akademik yang relevan dengan implementasi kurikulum dan dinamika otonomi guru dalam sistem pendidikan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai regulasi terkait Standar Nasional Pendidikan, dokumen Capaian Pembelajaran, serta pedoman pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan isi dokumen untuk menemukan keterkaitan antara standar nasional dan ruang otonomi guru dalam praktik pembelajaran.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis disajikan secara sistematis guna memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara komponen kurikulum, kebebasan profesional guru, dan regulasi nasional dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Capaian Pembelajaran (CP) sebagai Standar Nasional Pendidikan

Capaian Pembelajaran (CP) merupakan komponen inti dalam Kurikulum Merdeka. CP adalah rumusan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), Kurikulum Merdeka menyederhanakan kompetensi menjadi CP yang disusun berbasis fase (Fase A sampai F). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas waktu belajar karena tidak lagi terikat secara kaku pada jenjang kelas tertentu.

Fungsi utama CP adalah sebagai standar nasional pendidikan yang menjadi acuan seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya CP, pemerintah tetap menjaga arah dan mutu pendidikan secara merata. Artinya, meskipun guru memiliki kebebasan dalam menentukan strategi, metode, dan media pembelajaran, hasil akhir kompetensi yang dicapai peserta didik tetap mengacu pada standar yang sama.

Pendekatan berbasis fase juga memungkinkan diferensiasi pembelajaran. Peserta didik yang memiliki kemampuan lebih cepat dapat melampaui target lebih awal, sedangkan yang membutuhkan waktu lebih lama tetap memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi tanpa tekanan

administratif yang kaku. Dengan demikian, CP menjadi fondasi yang menjembatani fleksibilitas proses dan keseragaman standar hasil.

Selain berfungsi sebagai standar kompetensi, Capaian Pembelajaran (CP) dalam Kurikulum Merdeka juga mencerminkan perubahan orientasi penilaian dalam sistem pendidikan nasional. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian cenderung menitik beratkan pada pencapaian Kompetensi Dasar (KD) secara parsial dan terpisah, maka dalam Kurikulum Merdeka penilaian diarahkan pada ketercapaian kompetensi secara utuh pada akhir fase.

Hal ini mendorong guru untuk merancang asesmen yang lebih autentik, kontekstual, dan berkelanjutan, sehingga proses evaluasi tidak hanya mengukur hafalan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta penerapan konsep dalam kehidupan nyata.

CP juga memberikan kerangka yang lebih berhubungan antara jenjang pendidikan. Karena disusun berdasarkan fase perkembangan peserta didik, CP memungkinkan kesinambungan kompetensi dari pendidikan dasar hingga menengah. Setiap fase dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik, sehingga capaian yang ditetapkan lebih realistis dan sesuai dengan tahapan usia. Pendekatan ini memperkuat prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), di mana proses belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi individu.

Dalam konteks pemerataan mutu, CP menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa seluruh peserta didik di Indonesia, tanpa memandang latar belakang daerah atau kondisi sekolah, memiliki kesempatan mencapai kompetensi yang setara. Sebagai bagian dari kerangka Standar Nasional Pendidikan, CP memastikan bahwa desentralisasi pengelolaan pembelajaran tidak mengarah pada disparitas standar hasil. Dengan kata lain, variasi metode dan strategi pembelajaran di tingkat sekolah tetap berada dalam batas mutu yang telah ditetapkan secara nasional.

Lebih lanjut, fleksibilitas yang ditawarkan melalui pendekatan berbasis fase memberi ruang bagi inovasi pedagogis. Guru dapat mengintegrasikan berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, atau pendekatan berbasis masalah tanpa khawatir terhambat oleh target penyelesaian materi per kelas. Fleksibilitas ini mendorong pembelajaran yang lebih mendalam (*deep learning*), di mana peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara reflektif dan kreatif.

Pendekatan diferensiasi yang dimungkinkan oleh CP juga sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif. Dalam satu kelas yang runtut, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Peserta didik dengan kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan tambahan (enrichment), sementara peserta didik yang memerlukan dukungan lebih dapat memperoleh pendampingan tanpa harus tertinggal secara sistemik. Dengan demikian, CP tidak hanya menjadi standar akademik, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan dalam pembelajaran.

Dari perspektif kebijakan, CP merepresentasikan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem pendidikan. Pemerintah menetapkan kompetensi inti yang harus dicapai sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas pendidikan, sementara implementasi teknis diserahkan kepada guru sebagai profesional pendidikan. Hubungan ini menegaskan bahwa otonomi guru dalam Kurikulum Merdeka bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kebebasan yang terstruktur dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, Capaian Pembelajaran (CP) menjadi fondasi konseptual yang menjembatani fleksibilitas proses dan keseragaman standar hasil. Ia berperan sebagai kompas yang mengarahkan praktik pembelajaran sekaligus sebagai tolok ukur pencapaian mutu pendidikan nasional. Dengan desain berbasis fase, orientasi pada kompetensi esensial, serta dukungan terhadap diferensiasi pembelajaran, CP memperkuat transformasi paradigma pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

B. Perangkat Pembelajaran sebagai Wujud Otonomi Guru (TP, ATP, dan Modul Ajar)

Salah satu perubahan signifikan dalam Kurikulum Merdeka adalah penguatan peran guru sebagai perancang pembelajaran. Guru tidak lagi sekadar menjalankan perangkat pembelajaran yang seragam, melainkan diberi kewenangan menyusun Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Modul Ajar.

Tujuan Pembelajaran (TP) dikembangkan berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP). TP dirancang secara lebih spesifik dan operasional untuk menggambarkan kompetensi yang ingin dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan. Selanjutnya, TP dirangkai dalam Alur Tujuan Pembelajaran

(ATP), yang berfungsi sebagai peta atau urutan logis pembelajaran selama satu fase atau semester. ATP membantu guru memastikan pembelajaran berlangsung sistematis dan berkesinambungan.

Modul Ajar menggantikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sebelumnya cenderung administratif. Dalam Kurikulum Merdeka, Modul Ajar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Guru dapat menentukan metode pembelajaran, media yang digunakan, strategi diferensiasi, hingga bentuk asesmen yang relevan. Kebebasan ini mendorong kreativitas dan profesionalisme guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna.

Namun, otonomi tersebut tidak bersifat mutlak. Semua perangkat pembelajaran tetap harus merujuk pada CP sebagai standar nasional. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak menghilangkan regulasi, tetapi menggeser fokus dari kepatuhan administratif menuju tanggung jawab profesional.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah penguatan peran guru sebagai perancang utama pembelajaran (instructional designer) di kelas. Jika pada kurikulum sebelumnya guru cenderung berperan sebagai pelaksana perangkat yang sudah ditetapkan secara lebih seragam dan administratif, maka dalam Kurikulum Merdeka guru diberi ruang profesional untuk merancang, menyesuaikan, dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, konteks sekolah, serta lingkungan sosial budaya setempat.

Perubahan ini berangkat dari paradigma bahwa guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan belajar siswa di kelasnya. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran tidak lagi diposisikan sebagai sekadar dokumen administratif, melainkan sebagai proses reflektif dan strategis untuk memastikan pembelajaran benar-benar bermakna.

1. Pengembangan Tujuan Pembelajaran (TP)

Dalam Kurikulum Merdeka, Tujuan Pembelajaran (TP) dikembangkan berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP). CP merupakan rumusan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. Berbeda dengan Kompetensi Dasar (KD) pada kurikulum sebelumnya yang dirinci per kelas dan per semester, CP disusun per fase (misalnya Fase A, B, C, dan seterusnya) sehingga memberi ruang fleksibilitas dalam pengaturan waktu pencapaian kompetensi.

Dari CP tersebut, guru menurunkannya menjadi Tujuan Pembelajaran yang lebih spesifik, operasional, dan terukur. TP menggambarkan kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai siswa dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Perumusan TP biasanya memuat:

- A. Kompetensi atau kemampuan yang ingin dicapai
- B. Materi atau konten inti yang dipelajari
- C. Lingkup atau konteks pembelajaran
- D. Indikator ketercapaian yang dapat diamati dan diukur

Dengan TP yang jelas, guru memiliki arah yang terfokus dalam merancang aktivitas pembelajaran dan asesmen. TP juga membantu memastikan bahwa setiap kegiatan di kelas benar-benar mendukung pencapaian CP secara bertahap.

2. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)

Setelah merumuskan TP, guru menyusunnya dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). ATP berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) pembelajaran yang menggambarkan urutan logis dan sistematis dari berbagai tujuan yang akan dicapai selama satu fase atau satu semester. ATP tidak sekadar daftar tujuan, tetapi disusun dengan

mempertimbangkan:

- A. Urutan perkembangan konsep dari yang sederhana ke kompleks
- B. Keterkaitan antar materi
- C. Prasyarat pengetahuan atau keterampilan sebelumnya
- D. Alokasi waktu yang realistis
- E. Kebutuhan penguatan atau remedial

Dengan adanya ATP, pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan berkesinambungan. Guru dapat melihat gambaran besar proses belajar siswa serta mengantisipasi potensi kesenjangan pemahaman. ATP juga membantu menjaga kesinambungan pembelajaran antar kelas dalam satu fase, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu atau justru lompatan materi yang terlalu jauh.

3. Modul Ajar sebagai Perangkat Pembelajaran Fleksibel

Dalam Kurikulum Merdeka, Modul Ajar menggantikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sebelumnya sering dipandang terlalu administratif dan kaku. Modul Ajar dirancang lebih sederhana, fleksibel, dan berorientasi pada kualitas proses belajar. Komponen Modul Ajar umumnya meliputi:

- A. Identitas modul
- B. Tujuan Pembelajaran

- C. Pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik
- D. Kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup)
- E. Strategi pembelajaran dan metode yang digunakan
- F. Media dan sumber belajar
- G. Strategi diferensiasi (konten, proses, atau produk)
- H. Rencana asesmen (diagnostik, formatif, dan sumatif)
- I. Refleksi guru dan peserta didik

Fleksibilitas ini memberi ruang bagi guru untuk berinovasi. Guru dapat memilih pendekatan berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, atau model lain yang relevan. Selain itu, strategi diferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan belajar siswa yang beragam.

Dengan demikian, Modul Ajar tidak lagi menjadi dokumen formalitas, melainkan panduan nyata yang membantu guru menjalankan pembelajaran secara efektif dan reflektif.

4. Perubahan Paradigma: Dari Administratif ke Profesional

Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Semua perencanaan tetap harus mengacu pada CP sebagai standar nasional. Artinya, negara tetap menetapkan arah dan standar kompetensi, tetapi memberi kepercayaan kepada guru untuk menentukan strategi terbaik dalam mencapainya. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari:

- A. Kepatuhan administratif ke Tanggung jawab profesional
- B. Keseragaman perangkat ke Kontekstualisasi pembelajaran
- C. Dari fokus pada dokumen ke Fokus pada proses dan dampak belajar

Guru dituntut untuk lebih reflektif, kreatif, dan adaptif. Profesionalisme guru tidak lagi diukur dari kelengkapan dokumen semata, tetapi dari kualitas pengalaman belajar yang diciptakan dan sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan.

5. Tantangan dan Implikasi

Penguatan peran guru sebagai perancang pembelajaran juga membawa tantangan. Tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam merancang TP, ATP, dan Modul Ajar secara mandiri. Diperlukan:

- A. Penguatan kompetensi pedagogik
- B. Pelatihan berkelanjutan

- C. Komunitas belajar guru
- D. Dukungan manajemen sekolah

Namun, jika didukung secara optimal, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Guru menjadi lebih otonom sekaligus bertanggung jawab, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna, dan sekolah memiliki ruang untuk mengembangkan kekhasannya masing-masing.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka tidak menghilangkan regulasi, melainkan menyeimbangkan antara standar nasional dan kebebasan profesional. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, melalui perencanaan pembelajaran yang dirancang secara sadar, sistematis, dan kontekstual oleh guru sebagai aktor utama pendidikan.

C. Struktur Kurikulum dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Struktur Kurikulum Merdeka terdiri atas dua komponen utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pembelajaran intrakurikuler berorientasi pada penguasaan kompetensi akademik sesuai mata pelajaran. Materi disajikan secara lebih esensial agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep secara mendalam.

Sementara itu, P5 merupakan inovasi penting dalam Kurikulum Merdeka yang bertujuan memperkuat karakter peserta didik. Melalui pendekatan berbasis projek, siswa diajak untuk mengembangkan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Pelaksanaan P5 memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan tema projek sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Misalnya, sekolah di daerah pesisir dapat mengangkat tema lingkungan laut, sementara sekolah di daerah perkotaan dapat mengembangkan projek kewirausahaan atau teknologi. Walaupun demikian, dimensi dan nilai dasar Profil Pelajar Pancasila tetap ditetapkan secara nasional, sehingga arah pembentukan karakter tetap seragam.

Struktur kurikulum ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21. Kombinasi antara intrakurikuler dan P5 mencerminkan integrasi antara standar nasional dan kreativitas lokal.

Struktur dalam Kurikulum Merdeka dirancang lebih sederhana tetapi bermakna. Secara umum, kurikulum ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kedua komponen ini saling melengkapi: yang satu berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan (akademik), sementara yang lain menekankan pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21.

1. Pembelajaran Intrakurikuler

Pembelajaran intrakurikuler adalah kegiatan belajar utama yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain-lain. Pada bagian ini, peserta didik mempelajari konsep, teori, dan keterampilan akademik sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan secara nasional.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung padat materi, Kurikulum Merdeka menyajikan materi secara lebih esensial. Artinya, materi difokuskan pada konsep-konsep penting dan mendasar saja. Tujuannya agar:

- A. Siswa memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi secara mendalam.
- B. Guru tidak terburu-buru mengejar target materi.
- C. Pembelajaran lebih menekankan pemahaman konsep daripada sekadar menghafal.

Sebagai contoh, dalam pembelajaran Matematika, guru tidak hanya mengajarkan rumus, tetapi juga membantu siswa memahami alasan di balik rumus tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih kuat dan tahan lama.

Selain itu, pembelajaran intrakurikuler juga memberi ruang untuk diferensiasi. Guru dapat menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih inklusif dan berpihak pada peserta didik.

2. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Komponen kedua adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Inilah salah satu ciri khas dan inovasi penting dalam Kurikulum Merdeka. Jika intrakurikuler fokus pada akademik, maka P5 lebih menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi sosial.

P5 dirancang untuk menguatkan nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila, yang memiliki enam dimensi utama, yaitu:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia
2. Berkebinekaan global
3. Gotong royong
4. Mandiri
5. Bernalar kritis
6. Kreatif

Melalui kegiatan berbasis proyek, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam situasi nyata. Misalnya:

- A. Siswa membuat proyek kampanye menjaga kebersihan lingkungan sekolah (melatih gotong royong dan tanggung jawab).
- B. Siswa melakukan penelitian sederhana tentang pengelolaan sampah di sekitar rumah (melatih bernalar kritis).
- C. Siswa membuat produk kerajinan dari bahan daur ulang (melatih kreativitas dan kemandirian).

Pendekatan berbasis proyek ini membuat pembelajaran lebih aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Siswa belajar bekerja sama, berdiskusi, memecahkan masalah, serta mempresentasikan hasil kerja mereka.

3. Otonomi Sekolah dalam Pelaksanaan P5

Salah satu kelebihan P5 adalah adanya otonomi bagi sekolah untuk menentukan tema proyek sesuai kondisi dan potensi daerah masing-masing. Artinya, sekolah dapat menyesuaikan proyek dengan lingkungan sekitar agar lebih relevan dan bermakna. Contohnya:

- A. Sekolah di daerah pesisir dapat mengangkat tema pelestarian ekosistem laut.
- B. Sekolah di daerah pertanian dapat mengembangkan proyek tentang ketahanan pangan atau pertanian organik.
- C. Sekolah di perkotaan dapat membuat proyek kewirausahaan, teknologi digital, atau pengelolaan sampah perkotaan.

Walaupun tema dapat disesuaikan secara lokal, nilai dan dimensi Profil Pelajar Pancasila tetap menjadi acuan nasional. Hal ini memastikan bahwa pembentukan karakter siswa di seluruh Indonesia tetap memiliki arah yang sama.

4. Keseimbangan Akademik dan Karakter

Struktur Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan keterampilan abad ke-21.

Pembelajaran intrakurikuler memastikan siswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar.

P5 memastikan siswa memiliki sikap, nilai, dan kompetensi sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Kombinasi keduanya mencerminkan keseimbangan antara:

- A. Standar nasional dan kebutuhan lokal
- B. Pengetahuan dan karakter
- C. Teori dan praktik
- D. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial-emosional

Dengan struktur seperti ini, Kurikulum Merdeka berupaya membentuk peserta didik yang tidak hanya pintar, tetapi juga mampu bekerja sama, berpikir kritis, kreatif, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Secara sederhana, Kurikulum Merdeka ingin memastikan bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar mata pelajaran, tetapi juga tempat membentuk pribadi yang utuh dan siap menghadapi tantangan masa depan.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka menghadirkan transformasi mendasar dalam sistem pendidikan nasional dengan menyeimbangkan antara standar nasional dan otonomi profesional guru. Perubahan ini tampak jelas melalui penetapan Capaian Pembelajaran (CP) sebagai standar nasional berbasis fase, yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. CP berfungsi sebagai kompas arah pendidikan, memastikan bahwa seluruh peserta didik di Indonesia mencapai kompetensi esensial yang setara, tanpa terikat secara kaku pada pembagian kelas per tahun.

Pendekatan berbasis fase memungkinkan fleksibilitas waktu belajar, diferensiasi pembelajaran, serta kesinambungan kompetensi antartahap perkembangan. Dengan demikian, fleksibilitas proses tetap berada dalam kerangka standar hasil yang jelas dan terukur. Di sisi lain, penguatan peran guru sebagai perancang pembelajaran melalui penyusunan Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Modul Ajar menunjukkan pergeseran paradigma dari kepatuhan administratif menuju tanggung jawab profesional.

Guru tidak lagi sekadar pelaksana kurikulum, tetapi menjadi aktor utama yang merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks sekolah. Otonomi ini tetap terarah karena seluruh perangkat pembelajaran harus mengacu pada CP sebagai standar nasional.

Struktur kurikulum yang memadukan pembelajaran intrakurikuler dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) semakin menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya berorientasi pada penguasaan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi abad ke-21. Melalui P5, nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila diinternalisasikan melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan berbasis proyek, sehingga peserta didik berkembang secara utuh baik secara intelektual, sosial, maupun moral.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka merepresentasikan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, antara standar nasional dan kreativitas lokal, serta antara kecerdasan akademik dan pembentukan karakter. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal, sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses*. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Suyanto, & Jihad, A. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Standar Nasional Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Rahman and Aslan Aslan, "ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT FACING INDUSTRY 4.0 AND SOCIETY 5.0: INNOVATIVE LEADERSHIP TRANSFORMATION STRATEGIES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TECHNOLOGY, WEB PLATFORMS, AND VIRTUAL REALITY TO OPTIMISE INSTITUTIONAL PERFORMANCE BASED ON A REVIEW OF THE LATEST LITERATURE," *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 5, no. 1 (2025): 303–13.
- Aslan Aslan and Imelda Imelda, "EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY-BASED LEARNING PROCESSES AND OUTCOMES IN IMPROVING STUDENT COMPETENCE, MOTIVATION, AND ENGAGEMENT: A LITERATURE REVIEW OF DIGITAL ASSESSMENT MODELS IN THE ERA OF EDUCATION 4.0 TRANSFORMATION," *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 5, no. 1 (2025): 240–51.
- Zulvia Trinova et al., "INNOVATION AND DEVELOPMENT OF MULTIMODAL LEARNING MEDIA: A LITERATURE STUDY ON THE INTEGRATION OF PRINT, AUDIOVISUAL, AND COMPUTER TECHNOLOGY TO IMPROVE THE QUALITY OF 21ST CENTURY LEARNING PROCESSES," *Review of International Journal Education and School Leadership* 2, no. 1 (2025): 37–50.
- Almiati Almiati et al., "IMPLEMENTASI SISTEM FULLDAY SCHOOL DI SDS ISLAM TERPADU SULTHONIYAH SAMBAS TAHUN AJARAN 2024-2025," *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2025): 491–508.
- Moh Imron Rosidi and Aslan Aslan, "IMPLEMENTATION OF THE LOVE CURRICULUM IN SHAPING CHARACTER BASED ON COMPASSION IN STUDENTS AND ITS IMPACT ON HARMONIOUS RELATIONSHIPS BETWEEN EDUCATORS AND STUDENTS: A LITERATURE REVIEW," *International Journal of Teaching and Learning* 3, no. 2 (2025): 191–201.